

KESESUAIAN MODEL UPAYA HUKUM PAJAK DENGAN PRINSIP *EQUALITY* DAN *EQUITY*

Betta Triyanto

Mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS
cakra.tandia@gmail.com

Abstract

Income tax is one of the countries that contributed the most to finance national development. State gives credence to the taxpayer to calculate and report the tax itself and in the event of a difference to the amount of tax payments, the taxpayer may bring a legal action through the Administrative Law Settlement Mechanism and through the Tax Court. The purpose of this research is the completion of Administrative Law and through the Tax Court must be able to satisfy a sense of fairness and balance to the state and taxpayers.

Keywords: Tax Court, Equality, Equity.

Abstrak

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang memberikan kontribusi paling besar dalam membiayai Pembangunan Nasional. Negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri dan dalam hal terdapat perbedaan terhadap jumlah pembayaran pajak, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum melalui Mekanisme Penyelesaian Hukum Administratif maupun melalui Pengadilan Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah Penyelesaian Hukum Administratif maupun melalui Pengadilan Pajak harus dapat memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan bagi Negara maupun Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Keseimbangan, Keadilan.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak

(SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan. Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan wajib pajak, inilah salah satu sebab timbulnya sengketa pajak. Dalam kerangka negara hukum, dalam hal terjadi suatu sengketa pajak, wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Adapun jalur penyelesaian sengketa yang diberikan antara lain keberatan, banding, gugatan.

Sesuai dengan karakteristik pajak sebagai sumber utama pembiayaan bagi negara, pajak mempunyai peraturan yang spesifik, hal demikian terlihat dalam ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa pajak. Bentuk perlawanan yang boleh dilakukan oleh wajib bayar yang mengalami kerugian yang diperkenankan oleh hukum penerimaan negara bukan pajak adalah pengajuan keberatan. (Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng 2008 :127).

Pengajuan keberatan yang diajukan wajib pajak dilakukan dengan syarat - syarat yang ditetapkan oleh undang - undang dan ketika mengajukan wajib pajak meminta bukti penerimaan dari instansi pemerintah tempat memasukkan keberatan. Konsekuensi dalam pengajuan keberatan wajib pajak tetap berkewajiban membayar jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang dan konsekuensi instansi pemerintah melakukan penelitian dan pemeriksaan surat keberatan secara lengkap yang diajukan wajib bayar. Pemeriksaan surat keberatan dimaksud bahwa surat yang diajukan sesuai syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang. Dikemukakan dari penetapan keberatan setelah diajukan dan diperiksa oleh instansi pemerintah dapat berbentuk dua hal yakni ditolak atau dikabulkan. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP, tetapi keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % dari jumlah pajak berdasar keputusan keberatan (Pasal 25 ayat (9) UU No.28 tahun 2007). Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, apabila banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % dari putusan banding (Pasal 27 ayat (5d) UU No.28 tahun 2007). Kedua sanksi ini sebelumnya tidak dikenal dalam undang-undang yang lama. Pengenaan sanksi administrasi yang begitu tinggi dalam keberatan dan banding dimaksudkan agar lembaga keberatan dan banding tidak dijadikan sebagai alasan penundaan pembayaran pajak. Disisi lain, apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak sanksi tersebut tentunya sangat memberatkan, wajib pajak diberikan suatu akses untuk mencari keadilan tetapi disisi lain ada suatu ancaman berupa pengenaan sanksi yang tinggi, hal ini tentunya dapat mempengaruhi hasrat wajib pajak untuk mencari keadilan.

Selain dari prosedur penyelesaian sengketa pajak, spesifikasi lain terlihat dari mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Ada dua model penyelesaian sengketa pajak yaitu ; penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh instansi administrasi yang masih termasuk pihak yang berperkara, dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh instansi yang berdiri sendiri di luar pihak yang berperkara, yaitu Pengadilan Pajak (Jazim Hamidi dan Mariyadi Faqih 1999:50). Upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa melalui model pertama adalah upaya keberatan sedangkan dalam model kedua wajib pajak diberi kesempatan untuk mengajukan upaya banding dan gugatan.

B. Terjadinya Sengketa Pajak

Tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa. Pembangunan Nasional tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit dan sedapat mungkin dibiayai dengan kemampuan dan kemandirian sendiri. Untuk itu peranan penerimaan dalam negeri sangat penting dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan nasional. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat diandalkan adalah sektor pajak.

Pajak adalah Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Rochmat Soemitro 1990 :51).

Sejak sektor migas tidak dapat dijadikan andalan utama dalam penerimaan negara dan beralih pada sektor pajak, hal ini disikapi pemerintah dengan melakukan berbagai upaya dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari pajak, antara lain dengan cara membuat kebijaksanaan reformasi sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 1983. Salah satu perubahan yang menonjol dalam reformasi sistem perpajakan nasional adalah perubahan sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*. Berdasarkan sistem *self assessment* apabila masyarakat memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2000 jo UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Utang pajak menurut sistem *self assessment* timbul manakala telah terpenuhi syarat subyektif dan obyektif menurut ketentuan undang-undang, tanpa menunggu adanya campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak.

Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak dalam sistem *self assessment*

ini sudah sewajarnya diimbangi dengan instrument pengawasan agar kepercayaan itu tidak disalahgunakan wajib pajak. Untuk keperluan fiskus diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuannya dan menimbulkan koreksi, maka fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang mempunyai kedudukan sama dengan Surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Dalam praktek seringkali terjadi wajib pajak tidak menyetujui besarnya jumlah pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana yang tertuang dalam SKP. Perbedaan perhitungan antara fiskus dan wajib pajak inilah merupakan salah satu sebab timbulnya suatu sengketa pajak. Definisi sengketa pajak itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah, sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal terjadi suatu sengketa pajak, dalam kerangka negara hukum wajib pajak berhak diberi perlindungan hukum yang salah satu bentuknya adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Sesuai dengan karakteristik pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara, pajak mempunyai peraturan-peraturan yang spesifik yang tersebar dalam berbagai ketentuan baik dilihat dari prosedur, mekanisme penyelesaian sengketa pajak.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Apabila Dikaitkan Dengan Prinsip Equality Dan Equity

Sesuai dengan sifat pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara, pajak mempunyai peraturan-peraturan yang spesifik yang tersebar dalam berbagai ketentuan. Spesifikasi ini juga terlihat dalam prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak mempunyai karakteristik tersendiri yang berbedadengan

penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan pada umumnya. Hal yang membedakan penyelesaian sengketa pajak dengan penyelesaian sengketa pada umumnya adalah pertama: mengenai prosedur, dalam penyelesaian sengketa pajak ada ketentuan yang menyatakan bahwa, pengajuan keberatan, banding dan gugatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Undang-undang tidak memberi penjelasan secara jelas, dasar jumlah pajak yang harus dibayar apakah sesuai dengan SPT atau SKP. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai ketentuan tersebut, oleh fiskus ditafsirkan sebagai keharusan wajib pajak untuk melunasi seluruh hutang pajaknya sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam SKP. Apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak, penafsiran tersebut dianggap kurang memberi rasa keadilan bagi wajib pajak, karena jumlah hutang pajak yang tertuang dalam SKP justru merupakan obyek yang disengketakan. Hal ini juga tidak konsisten dengan asas *self assessment* yang dianut. Syarat ini dirasa sangat memberatkan wajib pajak dan tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi peradilan pada umumnya, bahwa peradilan harus dilakukan dengan biaya murah.

Penafsiran ketentuan dalam pengajuan keberatan, banding tidak menunda pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan utang pajak dengan keharusan melunasi utang pajak sejumlah yang tertuang dalam SKP menimbulkan masalah manakala dikaitkan dengan syarat pengajuan keberatan dan banding itu sendiri. Salah satu syarat pengajuan banding adalah adanya kewajiban wajib pajak untuk membayar sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang. Berkaitan dengan syarat ini ketentuan tidak menunda pembayaran pajak dalam banding diartikan sebagai keharusan membayar pajak hanya sebesar 50% dari jumlah yang terutang dalam SKP. Hal demikian berbeda dalam pengajuan keberatan. Dalam pengajuan keberatan memang tidak ada syarat yang mengharuskan wajib pajak untuk melunasi seluruh utang pajaknya sejumlah yang tertuang dalam SKP, tetapi dengan adanya ketentuan tidak menunda pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak diartikan oleh fiskus sebagai keharusan untuk melunasi utang pajaknya sebesar yang tertuang dalam SKP, dan apabila tidak dilunasi fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan, maka secara tidak langsung keharusan melunasi utang pajak sejumlah yang tertera dalam SKP menjadi syarat pengajuan keberatan. Ketidaksesuaian syarat antara keberatan dan banding inilah

yang menimbulkan persoalan, sedangkan pengajuan banding dalam penyelesaian sengketa pajak selalu diawali dengan adanya pengajuan keberatan. Syarat Pengajuan keberatan, banding tidak menunda pembayaran pajak yang oleh fiskus ditafsirkan melunasi semua jumlah pajak sebagaimana yang tertuang dalam SKP dalam UU KUP yang baru (UU No.28 tahun 2007) sudah dihapus dan diganti dengan kewajiban membayar pajak minimal sesuai yang disepakati wajib pajak. Tetapi ada ketentuan lain bahwa ketika wajib pajak kalah dalam keberatan maka wajib pajak dikenai sanksi 50% dan apabila wajib pajak ingin melanjutkan mencari upaya hukum lanjutan yaitu banding dan dalam putusan banding wajib pajak diputus kalah maka wajib pajak dikenai sanksi sebesar 100%. Disisi lain ketika fiskus yang dinyatakan kalah dalam keberatan maupun banding, fiskus hanya dikenai sanksi pembayaran bunga 2 % sebulan. Berdasarkan hal tersebut terlihat ada ketidakseimbangan aturan antara wajib pajak dengan fiskus. Disamping itu adanya sanksi denda pembayaran 50% dan 100% jika wajib pajak kalah dalam keberatan dan banding lebih dirasa sebagai suatu ancaman bagi wajib pajak dalam mencari upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Adanya sanksi yang tinggi tentunya akan menambah kurang percayadiri nya wajib pajak dengan kemampuan menghitung kewajiban perpajakannya mengingat cara perhitungan pajak yang cenderung rumit. Padahal pada dasarnya dalam suatu sengketa tidak selamanya perhitungan wajib pajaklah yang salah.

Hal lain yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa pajak yang dirasa kurang memberi perlindungan hukum terhadap wajib pajak adalah tidak adanya ketentuan yang memuat dasar-dasar pengajuan gugatan. Sedangkan syarat pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU No.14 tahun 2002 ditentukan bahwa gugatan harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

Sehubungan tidak adanya dasar-dasar gugatan dalam peraturan perundang-undangan pajak, maka dalam praktek digunakanlah dasar-dasar gugatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.5 tahun 1986 Jo.UU No.9 tahun 2004 tentang PTUN sebagai aturan umum (*lex generalis*), sedangkan pada dasarnya obyek gugat dalam pajak tentulah berbeda dengan gugatan dalam PTUN, dalam sengketa pajak yang disengketakan pada dasarnya tidak hanya suatu keputusan tetapi berkaitan juga dengan nominal tertentu berkaitan dengan pembayaran pajak. Kedua, mekanisme

penyelesaian sengketa pajak. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa penyelesaian sengketa pajak mengenal dua model penyelesaian yaitu;

penyelesaian melalui upaya administratif yaitu penyelesaian sengketa dimana penyelesaiannya masih termasuk pihak berperkara yaitu fiskus dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan murni yaitu Pengadilan Pajak.

Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Sebagaimana diuraikan di atas salah satu jalur penyelesaian sengketa pajak yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pajak adalah melalui upaya administratif yaitu keberatan. Untuk menyelesaikan sengketa administratif, jalur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, memang dimungkinkan menurut hukum positif kita, termasuk sengketa administrasi dalam hukum pajak. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ini dimaksudkan untuk memudahkan pencari keadilan memperoleh keadilan dan memperoleh perlindungan hukum, baik bagi administrasi sendiri maupun bagi warga. Demikian juga dalam penyelesaian sengketa pajak. Salah satu dasar pertimbangan semula, diberikannya penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, sehingga lebih cepat memberi kepastian hukum bagi kedua pihak baik wajib pajak maupun fiskus itu sendiri.

Sebagai suatu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa, upaya administratif mempunyai satu kelemahan, kelemahan ini berkaitan dengan keobyektifan lembaga tersebut. Penyelesaian sengketa pajak oleh lembaga keberatan, keobyektifannya memang patut diragukan karena yang memberi putusan adalah salah satu pihak yang bersengketa. Kekhawatiran terhadap keobyektifan lembaga keberatan sangat beralasan, manakala dikaitkan dengan asas, tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik untuk dirinya sendiri (*Nemo iudex in propria causa*) (Sudikno Mertokusumo 1977; 18-19)

Bentuk upaya administratif adalah keberatan dan banding administratif. Keberatan yaitu penyelesaian sengketa dimana penyelesaian sengketa adalah orang yang mengeluarkan keputusan. Adapun Syarat – Syarat Suatu keberatan adalah sebagai berikut

1. Dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
2. Memuat jumlah penerimaan negara bukan pajak

yang terutang sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan atau tagihan.

3. Ditujukan kepada instansi pemerintah yang menerbitkan surat ketetapan atau surat tagihan termaksud.
4. Diajukan dalam jangka tertentu, bulan sejak tanggal diterima penetapan itu. (Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, 2008:129)

Sedangkan banding administratif adalah penyelesaian sengketa dimana yang menyelesaikan sengketa adalah atasan atau pihak lain yang tidak mengeluarkan keputusan tetapi masih dalam lingkup pemerintah (eksekutif).

Dalam penyelesaian sengketa yang mengenal upaya administratif, apabila seluruh upaya administratif yang ditawarkan sudah ditempuh tetapi masih belum puas dengan putusan tersebut maka dapat mencari upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang PTUN). Demikian juga apabila kita terapkan pada penyelesaian sengketa pajak, apabila wajib pajak tidak puas atas putusan keberatan maka dapat mengajukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Tinggi Pajak. Tetapi berhubung Pengadilan Pajak tidak ada Pengadilan Tingginya maka upaya hukum lanjutan dari upaya administratif pajak adalah banding ke Pengadilan Pajak.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak. Apabila kita kaitkan dengan sistem peradilan secara umum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak memang masih belum sesuai dengan sistem peradilan yang ada. Dalam Penyelesaian sengketa pajak tidak mengenal upaya hukum kasasi sebagaimana yang upaya disediakan oleh peradilan pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui upaya hukum kasasi adalah upaya hukum tertinggi bagi pencari keadilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Dengan tidak ditawarkannya upaya hukum kasasi dalam penyelesaian sengketa pajak berarti terjadi adanya pemangkasan satu tingkatan saluran peradilan hal ini tentunya menyimpang dari ketentuan peradilan secara umum sebagaimana yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 22 UU No. 4 tahun 2004).

Pengadilan Pajak yang hanya ada satu, apabila kita kaitkan dengan peradilan secara umum juga tidak sesuai, dimana dalam pengadilan secara umum mengenal adanya Pengadilan Tingkat I yang berkedudukan di setiap Kabupaten dan Pengadilan

Tingkat II yang berkedudukan di ibukota Propinsi. Sedangkan dalam Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak hanya berjumlah satu di Indonesia yaitu yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Hal demikian tentunya dapat mengurangi pemberian perlindungan hukum terhadap wajib pajak karena dapat menyulitkan wajib pajak dalam mencari keadilan pada lembaga ini, disamping itu juga dapat menurunkan hasrat wajib pajak untuk mencari upaya hukum sampai ke Pengadilan mengingat faktor pertimbangan biaya, kerugian waktu dan sebagainya.

Apabila kita lihat bahwa adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat spesifik dalam peraturan perpajakan khususnya dalam penyelesaian sengketa pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak ketentuan tersebut kurang memberi keadilan bagi wajib pajak.

Pajak agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka perlu didukung dengan undang-undang yang baik pula. Undang-undang yang baik menurut Hofstra, adalah undang-undang yang tidak hanya berorientasi pada aspek makro yaitu aspek yang hanya berorientasi pada tuntutan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi syarat yang paling esensiil yaitu syarat mikro bahwa undang-undang pajak hendaknya memenuhi rasa keadilan. (Hussein Kartasasmita 1988:108)

Salah satu bentuk keadilan yang dapat diberikan adalah dengan menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dan wajib pajak. Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak, memungut pajak adalah wewenang yang dipunyai negara. Memungut pajak meskipun merupakan dipunyai negara, tetapi dalam pemungutannya jangan terlalu memberatkan masyarakat.

Dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada wajib pajak syarat keadilan (keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dan wajib pajak) juga harus terpenuhi dalam ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa pajak. Ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa pajak hendaknya jangan hanya memihak kepentingan fiskus dalam memasukkan pajak ke kas negara tetapi juga harus memperhatikan kepentingan wajib pajak, yaitu memberi kemudahan pada wajib pajak untuk membela haknya, khususnya dalam penyelesaian sengketa pajak.

D . Penutup

Penyelesaian sengketa pajak mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya. Hal yang membedakan adalah Pertama, Prosedur, dalam penyelesaian sengketa pajak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan, banding dan gugatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sehingga ketentuan ini di tafsirkan fiskus dengan keharusan bagi wajib pajak untuk melunasi seluruh hutang pajaknya sebagaimana yang tertuang dalam SKP atau minimal 50 %, syarat demikian memang sudah dihapus dalam UU No 28 tahun 2007 yang diganti dengan ancaman sanksi yang tinggi yaitu denda 50% dalam keberatan dan 100 % dalam banding jika wajib pajak kalah, sedangkan jika fiskus yang kalah fiskus hanya dibebani bunga sebesar 2 % sebulan. Kedua, Mekanisme penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa pajak mengenal jalur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif mempunyai kelemahan berkaitan dengan keobyektifan pemutus mengingat penyelesaiannya masih termasuk salah satu pihak yang berperkara. Selain upaya administratif penyelesaian sengketa pajak juga dapat diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. Penyelesaian sengketa pajak tidak mengenal upaya hukum kasasi. Jumlah Pengadilan Pajak hanya ada satu yaitu di Jakarta.

Penyelesaian sengketa pajak yang ada sekarang ini masih kurang memberi perlindungan hukum terhadap wajib pajak dan kurang mencerminkan prinsip equality (kesamaan) dan equity (keadilan). Hal demikian terlihat dalam pengaturan yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak, Pemerintah seharusnya menambah jumlah pengadilan pajak yang ada di Indonesia sehingga pihak yang berperkara lebih efisien dalam biaya dan waktu. Selain itu perlu adanya peraturan yang lebih jelas, spesifik, transparan dan adil yang mencerminkan prinsip equality dan equity dalam penyelesaian sengketa pajak.

Daftar Pustaka

Buku

- Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hussein Kartasasmita. 1988. *Reformasi Undang-undang Perpajakan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada .
- Jazim Hamidi dan Maryadi Faqih. 1999. *Mengenal Badan Penyelesaian Sengketa Pajak*, Bandung: Tarsito.
- Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng. 2008. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lili Rasjidi. 1999. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti.
- Rochmat Soemitro. 1999. *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*. Bandung: Eresco.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo. UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. UU No.

4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. UU No.9 tahun
2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.